



Anggaran BTT Capai Rp600 Miliar

■ DPRD DIY Minta Penanganan Covid-19 Lebih Optimal

YOGYA, TRIBUN - Anggaran Biaya Tak Tertunda (BTT) untuk penanganan Covid-19 Pemerintah DIY telah menyentuh Rp600 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY merestui jika alokasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkecukupan (SILPA) dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 boleh dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, yang mengatakan jika dana SILPA pemerintah DIY dalam perubahan anggaran kali ini sebanyak Rp7,3 miliar. Rekomendasi untuk dialihkan ke penanganan Covid-19 pun disampaikan secara aklamasi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY tanggal 9 September 2020 lalu.

"Hari ini (kemarin, Red) sudah penandatanganan persetujuan bersama dalam paripurna KUPA PPAA 2020," katanya, Kamis (10/9).

Huda menambahkan, para dewan memberikan beberapa catatan di antaranya pihak eksekutif diharapkan lebih optimal lagi dalam mengambil kebijakan strategis untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, Huda meminta agar jangan sampai ada rumah sakit rujukan yang kekurangan ruangan.

Serta keluarga pasien Covid-19 yang terabaikan. Ia juga mengkritik terkait peningkatan fasilitas kesehatan lainnya.

Hal lain, para dewan meminta agar relawan atau tim pemakaman Covid-19 supaya kembali dilakukan. "Karena te-

Kegiatan itulah yang direkomendasikan oleh tim Banggar dari tambahan dana BTT untuk penanganan Covid-19. Jangan ada lagi alasan keterbatasan anggaran. Sementara berbagai daftar isian komisi-komisi sebesar Rp19 miliar, tunda tahun depan. Covid-19 lebih penting

Huda Tri Yudianta
Wakil Ketua Banggar DPRD DIY



naga mereka masih sangat dibutuhkan. Khususnya dalam penanganan pemakaman jenazah. Kami tidak berharap ada yang meninggal. Tapi realitasnya tenaga mereka masih dibutuhkan," tegas pria yang juga sebagai Wakil ketua DPRD DIY ini.

Selain itu, politisi PKS ini meminta agar pemerintah DIY segera melakukan *rapid test* atau *swab* massal bagi pedagang dan petugas Jogoboro di kawasan Malioboro. Adanya tambahan anggaran dari alokasi dana SILPA kali ini, diharapkan tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran dalam hal penanganan Covid-19.

"Kegiatan itulah yang direkomendasikan oleh tim Banggar dari tambahan dana BTT untuk penanganan Covid-19. Jangan ada lagi alasan keterbatasan anggaran. Sementara berbagai

daftar isian komisi-komisi sebesar Rp19 miliar, tunda tahun depan. Covid-19 lebih penting," pungkasnya.

Anggota Komisi D DPRD DIY Imam Priyono mengatakan, program-program Dinsos DIY yang tahun ini tidak dapat dijalankan karena adanya *refocusing*, olehnya akan diusulkan pagu anggaran tersebut di tahun 2021.

Ia menjelaskan, saat ini tim dari komisi D sedang pemetaan program dari Dinsos yang telah *refocusing* untuk penanganan Covid-19. Saat disinggung mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Degradiasi, Imam justru baru me-

ngetahui saat ini.

Menurutnya program tersebut justru sangat penting untuk masa sekarang ini. Dirinya turut menyesalkan jika Dinsos DIY justru *refocusing* anggaran tersebut. Sehingga sebanyak 450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari rencana PKH Degradiasi harus ditunda.

"Kalau kegiatan sifatnya pembinaan itu kan justru sangat penting. Kenapa kok malah justru *refocusing*. Saya akan coba cari tahu nanti ke eksekutif," katanya saat dihubungi, kemarin.

Ia menambahkan, jika nantinya kegiatan PKH Degradiasi tersebut dihilangkan, pihaknya akan mengusulkan supaya 2021 harus ada program pengganti. "Karena itu kan termasuk upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat. Harusnya lebih jeli lagi dan bisa memilih mana program prioritas dan mana yang tidak," pungkasnya.

Laporan penggunaan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana, sebelumnya mengatakan penggunaan dana tak terduga (DTT) kali sudah mencapai sekitar Rp290 miliar. "Itu hanya untuk penanganan Covid-19 saja. Belum termasuk penanganan bencana konvensional sewaktu-waktu," katanya.

Ia menambahkan, total DTT yang ada sebesar Rp600 miliar. Sementara saat ini masih ada sekitar Rp310 miliar. Sisa anggaran tersebut harus mampu mencukupi keperluan penanganan Covid-19 sekaligus mitigasi bencana konvensional.

"Sisa Rp310 miliar. Itu pun belum termasuk keperluan di bulan ini. Untuk yang bulan ini baru akan dilakukan pembahasan," terang dia.

Pihaknya berharap agar musim hujan yang akan datang tidak terjadi peristiwa yang membuat sulit masyarakat. "Harapannya kan aman terkendali. Karena saat ini juga masih ada pandemi juga," kata pria yang juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY itu. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005